

PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA KANTOR KECAMATAN LARIANG KABUPATEN PASANGKAYU

Hijrah¹, Nurmiati², Fery³.

¹²³ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email korespondensi : feri.feri @gmail.com:)*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Good Governance* yang ada di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Dari data yang dikumpulkan disaring dan dipilih berdasarkan kebutuhan data kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dari hasil analisis data tersebut ditarik kesimpulan dan kemudian diberikan saran-saran.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan *good governance* belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan indikator akuntabilitas, transparansi dan aturan hukum

Kata Kunci. *good governance*, Kantor Kecamatan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of good governance at the Lariang District Office, Pasangkayu Regency. This research is qualitative. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation to gather the necessary primary and secondary data. The collected data is filtered and selected based on data requirements, then analyzed using qualitative analysis techniques. Conclusions are drawn from the data analysis and recommendations are provided.

The results indicate that good governance has not been fully implemented based on indicators of accountability, transparency, and the rule of law.

Keywords: good governance, District Office

PENDAHULUAN

Pelaksanaan *good governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis sejak munculnya era reformasi. Era tersebut menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* menjadi salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan. Paulus Effendi Lotulung (2012) mengemukakan bahwa “Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*.

Oleh karena itu berkaitan dengan *good governance*, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pelayanan yang diberikan kepada publik. Karena pada dasarnya peran pokok dari pemerintah adalah memberikan pelayanan publik antara

lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan memelihara keamanan, ketertiban, mewujudkan keadilan, memenuhi kepentingan umum, mewujudkan kesejahteraan sosial, perekonomian, pemeliharaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri selama ini publik ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi. Sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan dan hal tersebut perlu dirubah termasuk di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik.

Oleh karena itu orientasi dari *good governance* yaitu pemerintah Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu berupaya dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan

dapat memenuhi pelayanan yang terhadap publik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Demikian halnya Aparatur Negara Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu diharapkan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan penerapan *good governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu.

METODE PENELITIAN

Apabila dilihat dari segi pendekatannya penelitian ini kategorikan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk kata-kata, melaporkan padangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa pada primer dan pada data skunder.

Dari data yang dikumpulkan disaring dan dipilih berdasarkan kebutuhan data kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dari hasil analisis data tersebut ditarik kesimpulan dan kemudian diberikan saran-saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang baik dalam memperbaiki birokrasi publik agar sesuai dengan harapan- harapan publik. Itulah alasan mengapa dalam pencapaian *good governance* diperlukan kontrol penuh dari seluruh stakeholder terhadap birokrasi agar dapat akuntabel. Selain itu akuntabilitas dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan publik dalam rangka pencapaian *good governance* di Kantor Kecamatan Lariang Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu

Pencapaian *good governance* merupakan indikasi utama bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan

dan proses pembangunan yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun seperti halnya upaya dalam pencapaian hal tersebut tampaknya masih mengalami kesulitan dimana kondisi Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu masih belum mampu mengembangkan sistem yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Dari persepsi tersebut, akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam rangka pencapaian good governance. Konsep Akuntabilitas Pada dasarnya akuntabilitas merupakan suatu konsep yang baik dalam memperbaiki birokrasi publik agar sesuai dengan harapan-harapan publik. Itulah alasan mengapa dalam pencapaian good governance diperlukan kontrol penuh dari seluruh stakeholder terhadap birokrasi agar dapat akuntabel. Selain itu akuntabilitas dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan publik dalam rangka pencapaian good governance di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu akan bersifat transparan terhadap

rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip transparansi mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui prinsip transparansi dalam pelayanan publik, kebijakan pemerintah diharapkan akan lebih terbuka terhadap pengawasan, akses informasi dapat diakses secara terbukanya sehingga masyarakat mengetahui setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selain itu, keterbukaan akan menciptakan prinsip check and balances antara pemerintah masyarakat. Prinsip transparansi juga akan mampu menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik wajib memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat yang membutuhkan

Salah satu wujud dari penerapan prinsip transparansi di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu adalah terbukanya akses informasi kepada masyarakat dimana masyarakat bebas memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan. Berdasarkan penelusuran penulis, indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten

Pasangkayu dikatakan belum memuaskan. Hal ini dijadikan sebagai acuan Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu untuk terus memperbaiki pelayanan dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

3. Aturan hukum

Kepemerintahan di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh, walaupun pada dasarnya aturan tersebut telah diterapkan akan tetapi masih terdapat pegawai yang belum memahami sepenuhnya sehingga aturan tersebut masih dipersepsikan yang berbeda antara pegawai satu dengan lainnya, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu agar terus melakukan sosialisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan indikator dapat ditarik kesimpulan bahwa. pelaksanaan good governance belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan indikator akuntabilitas, transparansi dan aturan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Good E-Government: Transparansidan Akuntabilitas Publikmelalui E-Government*. Bayumedia Publising. Malang.
- Azhari.2002. *Konsep Good Governance*. Pembaruan.Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Moleong Lexy J. 2010. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Paulus Effendi Lotulung, 2012, *Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Jakarta.
- Sedermayanti. 2012. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*. Mandar Maju. Bandung.
- Fandy Tjiptono. (2002). *Strategi Pemasaran*. Penerbit Andi. Yogyakarta.